

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENANDATANGANAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	11
1.3    Tujuan Penelitian .....	11
1.4    Manfaat Penelitian .....	11
1.5    Metode Penelitian .....	13
1.5.1    Tipe Penelitian .....	13
1.5.2    Pendekatan Masalah .....	13
1.5.3    Sumber Bahan Hukum .....	14
1.5.4    Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
1.5.5    Analisis Bahan Hukum .....	16
1.6    Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II</b> .....	19
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM PAYLATER</b> .....	19
2.1    Pengertian Data Pribadi .....	19
2.1.1    Informasi Data Pribadi Bersifat Privat .....	23
2.1.2    Regulasi Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Indonesia .....	28

2.2	Karakteristik <i>Paylater</i> .....	30
2.2.1.	Pengertian <i>Paylater</i> .....	30
2.2.2	Perbedaan Kartu Kredit dan <i>Paylater</i> .....	31
2.2.3.	Jenis-Jenis Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pelanggaran Hak Privasi pada Layanan <i>Paylater</i> .....	38
<b>BAB III</b>	.....	45
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENCURIAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PAYLATER</b>	.....	45
3.1	Pengaturan UU ITE dan Kekosongan Hukum .....	45
3.2	Pengaruh Positif Jika Pengaturannya Ada .....	62
3.3	Model Pertanggungjawaban Pidana .....	66
<b>BAB IV</b>	.....	77
<b>PENUTUP</b>	.....	77
4.1	Kesimpulan.....	77
4.2	Saran .....	78
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	xiv

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE);

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829)